

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Komponen neraca yang paling sering muncul sebagai akun temuan atas SPI dan Kepatuhan pada laporan keuangan empat daerah tersebut adalah aset, khususnya aset lancar yaitu kas, persediaan, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya. Sedangkan komponen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang paling sering muncul sebagai akun temuan atas SPI dan Kepatuhan adalah belanja kemudian pendapatan. Belanja yang paling sering muncul adalah belanja operasi yaitu belanja barang dan jasa. Kemudian Pendapatan yang ditemukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Permasalahan terkait dengan temuan-temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan pada Empat Kabupaten/kota berdasarkan 4 kriteria pemberian opini yaitu:
  - A. Kota Bukittinggi
    1. Ditemukan sebelas kasus yang mengindikasikan ketidaksesuaian LKPD Kota Bukittinggi TA 2017-2021 dengan SAP, yaitu tiga kasus ketidaksesuaian dengan PSAP No. 01 penyajian laporan keuangan, tiga kasus ketidaksesuaian dengan PSAP No.05 Akuntansi Persediaan, tiga kasus ketidaksesuaian dengan PSAP No.07 Akuntansi Aset Tetap, dan dua kasus dengan Buletin teknis SAP No.15 tentang akuntansi tetap berbasis akrual.
    2. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditemukan total tiga puluh lima jumlah pelanggaran terkait kriteria ini, dua kasus kerugian daerah, dua kasus potensi kerugian daerah, 4 kasus kekurangan penerimaan, 6 kasus administrasi, dua kasus ketidakhematan, tujuh belas kasus ketidakefektifan, dan dua kasus ketidakefisienan. Persentase terbesar yaitu 48% kasus ketidakefektifan

3. Ketidakefektifan SPI diperoleh dari kelemahan yang dimiliki sebagian besar LKPD, yaitu terletak pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dengan total delapan belas kasus terdiri atas kasus: empat kasus pada penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, dua kasus pada penyimpangan perencanaan kegiatan yang tidak memadai, tiga kasus pada penyimpangan pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dua kasus pada penyimpangan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan, tiga kasus pada penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, tiga kasus pada penyimpangan pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBD, dan satu kasus pada penyimpangan kelemahan pengelolaan fisik aset, barang milik daerah yang tidak jelas keberadaannya, dan mekanisme swakelola tidak tertib.
4. Kecukupan pengungkapan pada neraca sudah diungkapkan berdasarkan indikator dalam PSAP No.1 Tahun 2010 akan tetapi komponen investasi jangka pendek dan kewajiban jangka panjang belum di ungkapkan, pada komponen LRA dan laporan arus kas kecukupan pengungkapan sudah baik, dan Permasalahan terkait kurangnya pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di komponen kebijakan akuntansi yang tidak mengungkapkan setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

#### B. Kabupaten Kepulauan Mentawai

1. Ditemukan dua puluh dua kasus yang mengindikasikan ketidaksesuaian LKPD Kepulauan Mentawai TA 2017-2021 dengan SAP, yaitu empat kasus ketidaksesuaian dengan PSAP No. 01 penyajian laporan keuangan, enam kasus ketidaksesuaian dengan PSAP No.05 Akuntansi Persediaan, dua kasus ketidaksesuaian dengan PSAP No.06 Akuntansi Investasi, satu kasus ketidaksesuaian dengan PSAP No.07 Akuntansi Aset Tetap, satu kasus ketidaksesuaian dengan Buletin teknis SAP No.13 tentang penyajian laporan

keuangan BLU, empat kasus ketidaksesuaian dengan Buletin teknis SAP No.04 tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah, satu kasus ketidaksesuaian dengan Buletin teknis SAP No.16 tentang akuntansi berbasis akrual, satu kasus ketidaksesuaian dengan Buletin teknis SAP No.17 tentang aset tak berwujud berbasis akrual, dan dua kasus ketidaksesuaian dengan Buletin teknis SAP No.18 tentang akuntansi penyusutan berbasis akrual.

2. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditemukan total empat puluh sembilan jumlah pelanggaran terkait kriteria ini, tiga belas kasus kerugian daerah, lima kasus potensi kerugian daerah, sembilan kasus kekurangan penerimaan, dua kasus administrasi, satu kasus ketidakhematan, tiga belas kasus ketidakefektifan, dan enam kasus ketidakefisienan. Persentase terbesar yaitu 13 % kasus ketidakefektifan dan kerugian daerah.
3. Ketidakefektifan SPI diperoleh dari kelemahan yang dimiliki sebagian besar LKPD, yaitu terletak pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dengan total dua puluh empat kasus terdiri atas kasus: tiga kasus pada penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, satu kasus pada penyimpangan perencanaan kegiatan yang tidak memadai, empat kasus pada penyimpangan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan, satu kasus pada penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, lima kasus pada penyimpangan pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBD, tiga kasus pada penyimpangan penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi pendapatan, tiga kasus pada penyimpangan penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya belanja dan empat kasus pada penyimpangan kelemahan pengelolaan fisik aset, barang milik daerah yang tidak jelas keberadaannya, dan mekanisme swakelola tidak tertib.

4. Kecukupan pengungkapan pada neraca sudah diungkapkan berdasarkan indikator dalam PSAP No.1 Tahun 2010 akan tetapi komponen investasi jangka pendek belum di ungkapkan, pada komponen LRA dan laporan arus kas kecukupan pengungkapan sudah baik, dan semua komponen pengungkapan berdasarkan indikator PSAP sudah diungkapkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sehingga kabupaten kepulauan Mentawai menjadi salah satu daerah yang mengungkapkan komponen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) lebih rinci dibandingkan dengan daerah lain.

### C. Kota Padang

1. Ditemukan tujuh kasus yang mengindikasikan ketidaksesuaian LKPD Kota Padang TA 2017-2021 dengan SAP, yaitu dua kasus ketidaksesuaian dengan PSAP No. 01 penyajian laporan keuangan, dua kasus ketidaksesuaian dengan PSAP No.05 Akuntansi Persediaan, satu kasus ketidaksesuaian dengan PSAP No.06 Akuntansi Investasi, dan dua kasus ketidaksesuaian dengan PSAP No.07 Akuntansi Aset Tetap.
2. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditemukan total lima puluh jumlah pelanggaran terkait kriteria ini, dua belas kasus kerugian daerah, empat kasus potensi kerugian daerah, delapan kasus kekurangan penerimaan, satu kasus administrasi, empat kasus ketidakhematan, sembilan belas kasus ketidakefektifan, dan dua kasus ketidakefisienan. Persentase terbesar yaitu 38% kasus ketidakefektifan.
3. Ketidakefektifan SPI diperoleh dari kelemahan yang dimiliki sebagian besar LKPD, yaitu terletak pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dengan total tiga puluh satu kasus terdiri atas kasus: delapan kasus pada penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, empat kasus pada penyimpangan perencanaan kegiatan yang tidak memadai, satu kasus pada penyimpangan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, tiga kasus pada penyimpangan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan, lima kasus pada penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan



bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, delapa kasus pada penyimpangan pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBD, satu kasus pada penyimpangan penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi pendapatan, dan satu kasus pada penyimpangan kelemahan pengelolaan fisik aset, barang milik daerah yang tidak jelas keberadaannya, dan mekanisme swakelola tidak tertib.

4. Kecukupan pengungkapan pada neraca sudah diungkapkan berdasarkan indikator dalam PSAP No.1 Tahun 2010 akan tetapi komponen investasi jangka pendek belum di ungkapkan, pada LRA Kota Padang tidak mengungkapkan komponen transfer, sedangkan pada laporan arus kas semua komponen sudah diungkapkan, dan Permasalahan terkait kurangnya pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di komponen kebijakan akuntansi yang tidak mengungkapkan setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

#### D. Kabupaten Pasaman Barat

1. Ditemukan lima belas kasus yang mengindikasikan ketidaksesuaian LKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2017-2021 dengan SAP, yaitu lima kasus ketidaksesuaian dengan PSAP No. 01 penyajian laporan keuangan, dua kasus ketidaksesuaian dengan PSAP No.05 Akuntansi Persediaan, tiga kasus ketidaksesuaian dengan Buletin teknis SAP No.04 tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah, satu kasus ketidaksesuaian dengan Buletin teknis SAP No.15 tentang akuntansi tetap berbasis akrual, dua kasus ketidaksesuaian dengan Buletin teknis SAP No.16 tentang akuntansi berbasis akrual, satu kasus ketidaksesuaian dengan Buletin teknis SAP No.17 tentang aset tak berwujud berbasis akrual, dan satu kasus ketidaksesuaian dengan Buletin teknis SAP No.18 tentang akuntansi penyusutan berbasis akrual.
2. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditemukan total tiga puluh tiga jumlah pelanggaran terkait kriteria ini, enam kasus kerugian daerah, lima kasus potensi kerugian daerah, delapan kasus

kekurangan penerimaan, tiga kasus administrasi, sembilan kasus ketidakefektifan, dan dua kasus ketidakefisienan. Persentase terbesar yaitu 27 % kasus ketidakefektifan.

3. Ketidakefektifan SPI diperoleh dari kelemahan yang dimiliki sebagian besar LKPD, yaitu terletak pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dengan total lima belas kasus terdiri atas kasus: empat kasus pada penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, tujuh kasus pada penyimpangan pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBD, tiga kasus pada penyimpangan penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja, dan satu kasus pada penyimpangan kelemahan pengelolaan fisik aset, barang milik daerah yang tidak jelas keberadaannya, dan mekanisme swakelola tidak tertib.
4. Kecukupan pengungkapan pada neraca sudah diungkapkan berdasarkan indikator dalam PSAP No.1 Tahun 2010 akan tetapi komponen investasi jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang belum di ungkapkan, pada LRA dan arus kas Kabupaten Pasaman Barat semua komponen sudah diungkapkan, dan Permasalahan terkait kurangnya pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di komponen kebijakan akuntansi yang tidak mengungkapkan setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
3. Kendala bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai di tahun 2020 dan 2021 yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian adalah terletak pada rekomendasi-rekomendasi yang sebelumnya menjadi kendala yang tidak ditindaklanjuti dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

## 5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya menggunakan 4 kabupaten/kota sebagai objek penelitian atas analisis temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK di Provinsi Sumatera Barat, keterbatasan jangka waktu penelitian yang digunakan masih tergolong standar, yaitu lima tahun

penelitian (2017 sampai 2021), terbatasnya data primer pada masing-masing kabupaten kota karena keterbatasan waktu dan keterbatasan jarak dalam memperoleh data primer, dan peneliti menyadari bahwa ilmu yang dimiliki masih sangat terbatas sehingga kemampuan analisis peneliti masih terbatas.

### 5.3 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu perlu melakukan analisis terhadap semua temuan dari 19 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat dengan memperpanjang periode penelitian, baik daerah yang mendapatkan opini WTP ataupun yang bukan, dan dikarenakan keterbatasan jarak serta waktu yang lebih fleksibel untuk memperoleh data primer, terkait hal-hal yang menjadi penyebab temuan ketidakefektifan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keterbatasan tersebut menjadi saran dalam penelitian terbaru untuk kedepannya yang perlu diteliti, terlebih di Provinsi Sumatera Barat masih minim penelitian yang menganalisis masing-masing temuan dari pemeriksaan BPK. Sebab dengan mengetahui penyebab dari masing-masing temuan dalam LHP selain dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu literatur akuntansi pemerintah juga menjadi pedoman oleh pihak-pihak berkepentingan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan pengendalian.

